



# **LAPORAN KINERJA**

## **TIM KERJA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TRIWULAN I TAHUN 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Jl. Jendral Sudirman No. 90 Palembang**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dokumen ini memuat capaian kinerja, realisasi program, serta berbagai langkah strategis dalam mengawal kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal dan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) selama periode berjalan.

Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi dari seluruh anggota tim serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Evaluasi yang tertuang di dalamnya diharapkan dapat menjadi bahan acuan yang objektif untuk perbaikan kebijakan, peningkatan realisasi investasi, dan penyempurnaan program kerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam penyusunan laporan ini.

Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Khususnya Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Palembang, Mei 2026

**Ketua Tim Kerja Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal**



**Jimi Abdul Wahid, SH., MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198005252007011023

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Kata Pengantar ..... ii

Daftar Isi..... vi

Bab I. PENDAHULUAN..... 1

    I.1. Latar Belakang ..... 1

    I.2. Dasar Hukum..... 3

    I.3. Maksud dan Tujuan ..... 4

    I.4. Gambaran Umum Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM ..... 4

    I.5. Sistematika Penyusunan Laporan..... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6

    II.1. Perencanaan Kinerja Tim Kerja ..... 6

        a) Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah ..... 6

        b) Perjanjian Kinerja Tahun 2026..... 6

    II.2. Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2026 ..... 7

BAB III PENCAPAIAN REALISASI KINERJA ..... 6

    III.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Analisis Pencapaian ..... 6

    III.2. Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2026 dan Analisis Pencapaian ..... 6

BAB IV PENUTUP ..... 6

    IV.1. Kesimpulan ..... 6

    IV.2. Rencana Tindak Lanjut ..... 6

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menerangkan bahwa :

1. **Penanaman modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang

ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

### **1.2. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 pengganti Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja triwulan ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah melalui pencapaian kinerja Pokja dan seluruh komponen didalam struktur organisasi sehingga dapat diketahui tahapan capaian kinerja dimaksud. Dan apabila terdapat masalah dan hambatan, maka dapat segera dilakukan evaluasi dan pengendalian terkait kinerja Pokja tersebut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

#### **1.4. Gambaran Umum Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap penanaman modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal, agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, adapun ruang lingkup pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut :

##### **1. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal. Kegiatan pemantauan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi, operasi komersial atau sejak mendapatkan perizinan berusaha.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap :

- a. LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- b. Laporan realisasi impor dan/atau fasilitas fiskal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha;
- c. Laporan kegiatan kantor perwakilan oleh KPPA, KP3A, BUJKA, dan KPA Migas; dan
- d. Laporan kegiatan usaha lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan Instansi Teknis terkait.

Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Usaha yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) atau belum memproduksi Komersil dan Kegiatan Usaha yang sudah memproduksi Komersil wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dengan periode laporan Triwulan I paling lambat tanggal 10 bulan April, Laporan Triwulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli, Laporan Triwulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober, dan Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun yang berikutnya;
- b. Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota). Perusahaan yang melakukan usaha lebih dari 1 (satu) Pokja usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap Pokja usaha dalam LKPM;
- c. Pelaku Usaha yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **2. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. Adapun kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui :

- a. Bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;

- b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- d. Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
- e. Pengawasan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan.

Bagi perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya. Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di Pokja penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

### **3. Pengawasan Penanaman Modal**

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal. Adapun kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. Evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
- c. Permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau Instansi Teknis terkait;

- d. Adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8;
- e. Usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada BKPM oleh DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;
- f. Usulan Pencabutan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada DPMPTSP Provinsi oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; atau
- g. Proses pengenalan dan pencabutan sanksi.

Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 3 (Tiga) Hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat yang tersedia. Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksna dan pimpnan/penanggung jawab perusahaan.

Kondisi dan potensi SDM aparatur yang ada di Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai kinerja sasaran Bidang untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Maka dalam pelaksanaanya dibutuhkan SDM dengan kapasitas sesuai kebutuhan dan kapabilitas yang baik.

Berikut adalah rekapitulasi kondisi pegawai Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan triwulan I tahun 2026 :

Tabel. 1  
Rekapitulasi ASN PNS  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2026

| No | PNS    | Jumlah | Jenjang           | SLTA    |        | Strata 1 |        | Strata 2 |        | Total |
|----|--------|--------|-------------------|---------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|
|    |        |        |                   | Gol.III | Gol.IV | Gol.III  | Gol.IV | Gol.III  | Gol.IV |       |
| 1  | Wanita | 3 org  | PKPM Ahli Madya   | 0       | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0     |
|    |        |        | PKPM Ahli Muda    | 0       | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0     |
|    |        |        | PKPM Ahli Pertama | 0       | 0      | 0        | 0      | 3        | 0      | 0     |
|    |        |        | Total             | 0       | 0      | 0        | 0      | 3        | 0      | 3     |
| 2  | Pria   | 4 org  | PKPM Ahli Madya   | 0       | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0     |
|    |        |        | PKPM Ahli Muda    | 0       | 0      | 0        | 0      | 1        | 2      | 3     |
|    |        |        | PKPM Ahli Pertama | 0       | 0      | 0        | 0      | 0        | 1      | 1     |
|    |        |        | Total             | 0       | 0      | 0        | 0      | 1        | 3      | 4     |
|    | Jumlah | 7 org  |                   | 0       | 0      | 0        | 0      | 4        | 3      | 7     |

Dari Tabel 1 tersebut dukungan Sumber Daya Manusia PNS Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 7 orang, terdiri dari 3 orang wanita dan 4 orang pria.

Tabel. 2  
Rekapitulasi ASN PPPK  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2026

| No | PPPK   | Jumlah | Golongan | SLTA | Strata 1 | Strata 2 | Total |
|----|--------|--------|----------|------|----------|----------|-------|
| 1  | Wanita | 2 org  | Gol. V   | 0    | 0        | 0        | 0     |
|    |        |        | Gol. IX  | 0    | 2        | 0        | 2     |
|    |        |        | Gol. X   | 0    | 0        | 0        | 0     |
|    |        |        | Total    | 0    | 2        | 0        | 2     |
| 2  | Pria   | 5 org  | Gol. V   | 0    | 0        | 0        | 0     |
|    |        |        | Gol. IX  | 0    | 5        | 0        | 5     |
|    |        |        | Gol. X   | 0    | 0        | 0        | 0     |
|    |        |        | Total    | 0    | 5        | 0        | 5     |
|    | Jumlah | 7 org  |          | 0    | 7        | 0        | 7     |

Dari Tabel 2 tersebut dukungan Sumber Daya Manusia PPPK Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 7 orang, terdiri dari 2 orang wanita dan 5 orang pria.

Tabel. 3  
Komposisi ASN Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2026

| No  | Jenis Pengelompokan       | Uraian            | Komposisi |                |
|-----|---------------------------|-------------------|-----------|----------------|
|     |                           |                   | Jumlah    | Persentase (%) |
| PNS |                           |                   |           |                |
| 1   | Berdasarkan Jenis Kelamin | Wanita            | 3         | 42,86          |
|     |                           | Pria              | 4         | 51,14          |
| 2   | Berdasarkan Jenjang       | PKPM Ahli Madya   | 0         | 0              |
|     |                           | PKPM Ahli Muda    | 3         | 42,86          |
|     |                           | PKPM Ahli Pertama | 4         | 51,14          |
| 3   | Berdasarkan Golongan      | Gol. IV           | 3         | 42,86          |
|     |                           | Gol. III          | 4         | 51,14          |
| 4   | Berdasarkan Pendidikan    | SLTA              | 0         | 0              |

|      |                           |          |   |       |
|------|---------------------------|----------|---|-------|
|      |                           | Strata 1 | 0 | 0     |
|      |                           | Strata 2 | 7 | 100   |
| PPPK |                           |          |   |       |
| 1    | Berdasarkan Jenis Kelamin | Wanita   | 2 | 28,58 |
|      |                           | Pria     | 5 | 71,43 |
| 2    | Berdasarkan Golongan      | Gol. V   | 0 | 22,22 |
|      |                           | Gol. IX  | 7 | 100   |
|      |                           | Gol. X   | 0 | 0     |
| 3    | Berdasarkan Pendidikan    | SLTA     | 0 | 0     |
|      |                           | Strata 1 | 7 | 100   |
|      |                           | Strata 2 | 0 | 0     |

Dilihat dari tabel 3 tersebut bahwa komposisi ASN Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 2 yaitu ASN PNS dan ASN PPPK. Komposisi ASN PNS untuk triwulan I tahun 2026 Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 3 orang wanita atau 42,86% dan 4 orang pria atau 51,14%, dimana untuk tim kerja sudah cukup memenuhi kebutuhan pegawai. Berdasarkan jenjang ASN PNS terdiri dari 3 orang jenjang PKPM Ahli Muda atau 42,86% dan 4 orang jenjang PKPM Ahli Pertama atau 51,14%. Berdasarkan golongan ASN PNS terdiri dari 3 orang golongan III atau 42,86% dan 4 orang golongan IV atau 51,14%. Berdasarkan pendidikan komposisi pegawai sudah baik, dimana ASN PNS sebagian besar sudah mencapai strata 2 atau 100%.

Komposisi ASN PPPK untuk triwulan I tahun 2026 Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 2 orang wanita atau 28,58% dan 5 orang pria atau 71,43%, dimana untuk tim kerja sudah cukup memenuhi kebutuhan pegawai. Berdasarkan golongan ASN PPPK mayoritas golongan IX atau 100%. Berdasarkan pendidikan komposisi pegawai sudah baik, dimana ASN PPPK sebagian besar sudah mencapai strata 1 atau 100%.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan SDM aparatur terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim kerja berdasarkan komposisi ASN sudah memenuhi hanya perlu dukungan peningkatan kapabilitas melalui pelatihan formal maupun teknis.

**1.5. Sistimatika Penyusunan Laporan**

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang

I.2. Dasar Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Gambaran Umum Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM

I.5. Sistimatika Penyusunan Laporan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

II.1. Perencanaan Kinerja Tim Kerja

a) Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

b) Perjanjian Kinerja Tahun 2026

II.2. Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2026

**BAB III PENCAPAIAN REALISASI KINERJA**

III.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Analisis Pencapaian

III.2. Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2026 dan Analisis Pencapaian

**BAB IV PENUTUP**

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Perencanaan Kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan PM**

##### **a) Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah**

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan DPMPTSP Prov. Sumsel dalam meningkatkan investasi daerah, maka Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian sasaran mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui upaya pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : *Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha*. Melalui indikator tersebut diharapkan upaya pencapaian realisasi investasi baik PMA maupun PMDN dapat sesuai dengan rencana investasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya adalah kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:

1. Identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat persiapan dan identifikasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dilakukan melalui rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan dengan melibatkan

Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait, atau narasumber, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait.

Tabel.4  
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan (IKK)  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tahun 2026

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja                                                             | Target 2026 | Target per Triwulan |     | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----|-----------|-------------|
| 1  | 2                                                              | 3                                                                             |             | 4                   |     | 5         | 6           |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha | 70 %        | TW 1                | 0%  | 0         | 0           |
|    |                                                                |                                                                               |             | TW 2                | 0%  |           |             |
|    |                                                                |                                                                               |             | TW 3                | 70% |           |             |
|    |                                                                |                                                                               |             | TW 4                | 0%  |           |             |

b) Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tabel.5  
Tabel Perencanaan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tahun 2026

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja                                                                                    | Target 2026           | Target per Triwulan |        |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                    | 4                     | 5                   |        |
| 1  | Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel | Persentase Pertumbuhan Investasi                                                                     | 7,5 %                 | TW 1                | 1,75 % |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 2 %    |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 1,75 % |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 2 %    |
|    |                                                                | Realisasi Investasi PMA dan PMDN                                                                     | 44,63 Trilyun (RPJMD) | TW 1                | 11,16  |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 11,16  |
| 2  | Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha | 70 %                  | TW 3                | 70%    |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 0%     |
|    |                                                                | Jumlah LKPM yang disampaikan Oleh Pelaku Usaha                                                       | 16.000 LKPM           | TW 1                | 4.000  |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 4.000  |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 4.000  |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 4.000  |

II.1. Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2026

Adapun peningkatan pengendalian terhadap pelaksanaan Penanaman Modal tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh program kegiatan yang didanai oleh Dana APBD dengan pagu sebesar Rp. 533.241.248,- dengan target 45 proyek PMA dan PMDN strategis.

Tabel.6  
Perencanaan Program/ Kegiatan Tahun 2026  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tahun 2026

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Target Kinerja    | Anggaran (Rp) | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                                                              | 4                 | 5             | 6          |
| I. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   |                                                                                |                   |               |            |
| 1. | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                          |                                                                                |                   | 533.241.248   |            |
| a. | Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha | Tercapainya rasio realisasi investasi terhadap rencana investasi (PMA-PMDN)    | 2 Kegiatan Usaha  | 20.000.000    |            |
| b. | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang di bina tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal | 86 Pelaku Usaha   | 50.000.000    |            |
| c. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                    | Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/pelaksanaan BAP                | 45 BAP Perusahaan | 463.241.248   |            |

**BAB III**  
**PENCAPAIAN RELISASI KINERJA**

**III.1. Capaian Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan Analisis**

**Pencapaian**

Kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat dilihat dari pencapaian atau realisasi indikator sasaran dari target-target yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut telah tertuang didalam perjanjian kinerja yang telah disusun berdasarkan perumusan strategis (Pohon Kinerja) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan berpedoman kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029.

Capaian kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ini disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk pencapaian Sasaran Strategis guna mendukung pencapaian Sasaran Utama dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Ketua Tim Kerja tersebut, maka ditetapkan tiga Sasaran dan indikatornya yang disusun dalam perjanjian kinerja antara PKPM Ahli Madya dan PKPM Ahli Muda. Adapun pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perjanjian tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel.6  
Capaian Realisasi Perencanaan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tahun 2026

| No | Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja                                                                                    | Target 2026           | Target per Triwulan |        | Realisasi | Capaian (%) |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | 2                                                              | 3                                                                                                    | 4                     | 5                   |        | 6         | 7           |
| 1  | Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel | Persentase Pertumbuhan Investasi                                                                     | 7,5 %                 | TW 1                | 1,75 % | -5,50     | -314,32     |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 2 %    |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 1,75 % |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 2 %    |           |             |
|    |                                                                | Realisasi Investasi PMA dan PMDN                                                                     | 44,63 Trilyun (RPJMD) | TW 1                | 11,16  | 12,96     | 116,13      |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 11,16  |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 11,16  |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 11,16  |           |             |
| 2  | Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha | 70 %                  | TW 1                | 0 %    | 0         | 0           |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 0 %    |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 70 %   |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 0 %    |           |             |
|    |                                                                | Jumlah LKPM yang disampaikan Oleh Pelaku Usaha                                                       | 16.000 LKPM           | TW 1                | 4.000  | 8.075     | 201,87      |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 2                | 4.000  |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 3                | 4.000  |           |             |
|    |                                                                |                                                                                                      |                       | TW 4                | 4.000  |           |             |

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif adalah dengan mewujudkan Sasaran Strategis *Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel* dengan indikator *Persentase Pertumbuhan Investasi dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN*. Maksudnya adalah perbandingan antara Realisasi Investasi yang dicapai dengan rencana investasi pada tahun berjalan, yang telah ditetapkan berdasarkan rencana investasi perusahaan yang telah diverifikasi dimana akan direalisasikan pada tahun berjalan tersebut. Dalam hal ini disepakati sebagai nilai rencana investasi adalah target investasi, dengan penjabaran sebagai berikut :

- **Target Nasional** untuk Investasi PMA dan PMDN untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 73,70 Trilyun. Dengan estimasi realisasi investasi tersebut tercapai sesuai target, maka nilai realisasi investasi tahun 2025 adalah Rp. 78,85 Trilyun. Atau bila dibandingkan sesuai narasi rasio :  $73,70 \text{ Trilyun} / 73,70 \text{ Trilyun} = 1 \rightarrow$  rasio angka 1  
Pencapaian 73,70 Trilyun tersebut dibagi dalam 4 Triwulan dengan penjabaran sebagai berikut :
  - Triwulan I = 18,43 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan II = 18,43 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan III = 18,43 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan IV = 18,43 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
- **Target Daerah** untuk Investasi PMA dan PMDN untuk Tahun 2026 sebesar Rp. 44,63 Trilyun. Dengan estimasi realisasi investasi tersebut tercapai sesuai target, maka nilai realisasi investasi tahun 2025 adalah Rp. 42,50 Trilyun. Atau bila dibandingkan sesuai narasi rasio :  $44,63 \text{ Trilyun} / 44,63 \text{ Trilyun} = 1 \rightarrow$  rasio angka 1  
Pencapaian 44,63 Trilyun tersebut dibagi dalam 4 Triwulan dengan penjabaran sebagai berikut :
  - Triwulan I = 11,16 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan II = 11,16 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan III = 11,16 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
  - Triwulan IV = 11,16 Trilyun dengan target Rasio = 1 ( tercapai )
- Pencapaian realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis pada Triwulan Berikut rincian dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel.3  
Realisasi Investasi PMA-PMDN Triwulan I Tahun 2026

| Jenis PM | Nilai Investasi (Rp.)                    | Jumlah LKPM | Tenaga Kerja (org) |     |        |
|----------|------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|--------|
|          |                                          |             | TKI                | TKA | Total  |
| PMA      | 2.535.384.104.278,00<br>(2,53 Trilyun)   | 502         | 2.291              | 19  | 2.310  |
| PMDN     | 10.426.023.096.604,00<br>(10,43 Trilyun) | 7.573       | 10.290             | 2   | 10.292 |
| Total    | 12.961.407.200.882,00<br>(12,96 Trilyun) | 8.075       | 12.581             | 21  | 12.602 |

Pencapaian pada triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 12.961.407.200.882,00 (Rp. 12,96 Trilyun) atau tercapai 70,32% dari target nasional Rp. 18,43 Trilyun, dan tercapai 116,13% dari target daerah Rp. 11,16 Trilyun bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi investasi triwulan I tahun 2025 lalu (Y/Y) sebesar Rp. 13.715.857.700.578,00 (Rp. 13,71 Trilyun) atau tercapai 69,56% dari target nasional Rp. 19,71 Trilyun, dan tercapai 128,97% dari target daerah Rp. 10,63 Trilyun.

Pada realisasi investasi PMDN didominasi oleh sektor primer sebesar Rp. 4.906.127.793.652,00 (Rp. 4,906 Trilyun). Adapun Sub bidang usaha yang mendukung pencapaian realisasi investasi PMDN ini terdapat pada sub sektor Pertambangan. Dimana pada sektor Pertambangan salah satunya didukung oleh PT. Golden Blossom Sumatra di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sedangkan pada realisasi investasi PMA juga didominasi oleh sektor sekunder sebesar Rp. 1.487.529.476.470,00 (Rp. 1.487 Trilyun). Adapun Sub bidang usaha yang mendukung pencapaian realisasi investasi PMA ini terdapat pada sub sektor Industri Kertas dan Percetakan. Dimana pada sektor Industri Kertas dan Percetakan didukung oleh PT. Oki Pulp & Paper Mills di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Untuk menjelaskan kinerja pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan wilayah perkab/ kota dan berdasarkan sub sektor triwulan I tahun 2026, dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

I. REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN WILAYAH

Pada tabel.4 menyajikan rincian realisasi investasi PMA Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan wilayah perkab/kota se-Sumatera Selatan.

Tabel. 11  
Rincian Realisasi Investasi PMA Triwulan I Tahun 2026  
berdasarkan wilayah perkab/ kota se Sumatera Selatan

| No | Kabupaten / Kota | Realisasi Investasi (Rp) | Jumlah LKPM | Penggunaan Tenaga Kerja (Org) |     |       |
|----|------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|
|    |                  |                          |             | TKI                           | TKA | Total |
| 1  | Banyuasin        | 237.021.206.709,00       | 68          | 951                           | 0   | 951   |
| 2  | Empat Lawang     | 0,00                     | 0           | 0                             | 0   | 0     |
| 3  | Lahat            | 3.354.975.432,00         | 10          | 9                             | 0   | 9     |
| 4  | Muara Enim       | 535.234.479.517,00       | 36          | 110                           | 6   | 116   |
| 5  | Musi Banyuasin   | 74.703.892.942,00        | 51          | 130                           | 2   | 132   |
| 6  | Musi Rawas       | 93.855.820.224,00        | 23          | 89                            | 0   | 89    |
| 7  | MURATARA         | 13.789.095.855,00        | 8           | 175                           | 0   | 175   |
| 8  | Ogan Ilir        | 51.465.275.277,00        | 25          | 3                             | 0   | 3     |
| 9  | OKI              | 1.210.882.116.861,00     | 35          | 56                            | 0   | 56    |
| 10 | OKU              | 1.952.324.459,00         | 9           | 2                             | 0   | 2     |
| 11 | OKUS             | 2.371.692.947,00         | 4           | 141                           | 0   | 141   |
| 12 | OKUT             | 11.605.053.236,00        | 8           | 3                             | 0   | 3     |
| 13 | PALI             | 17.411.421.111,00        | 6           | 18                            | 0   | 18    |
| 14 | Lubuk Linggau    | 3.292.591.971,00         | 6           | 44                            | 0   | 44    |
| 15 | Pagar alam       | 0,00                     | 1           | 0                             | 0   | 0     |
| 16 | Palembang        | 244.574.054.880,00       | 200         | 548                           | 11  | 559   |
| 17 | Prabumulih       | 33.870.102.857,00        | 12          | 12                            | 0   | 12    |
|    | Jumlah           | 2.535.384.104.278,00     | 502         | 2.291                         | 19  | 2.310 |

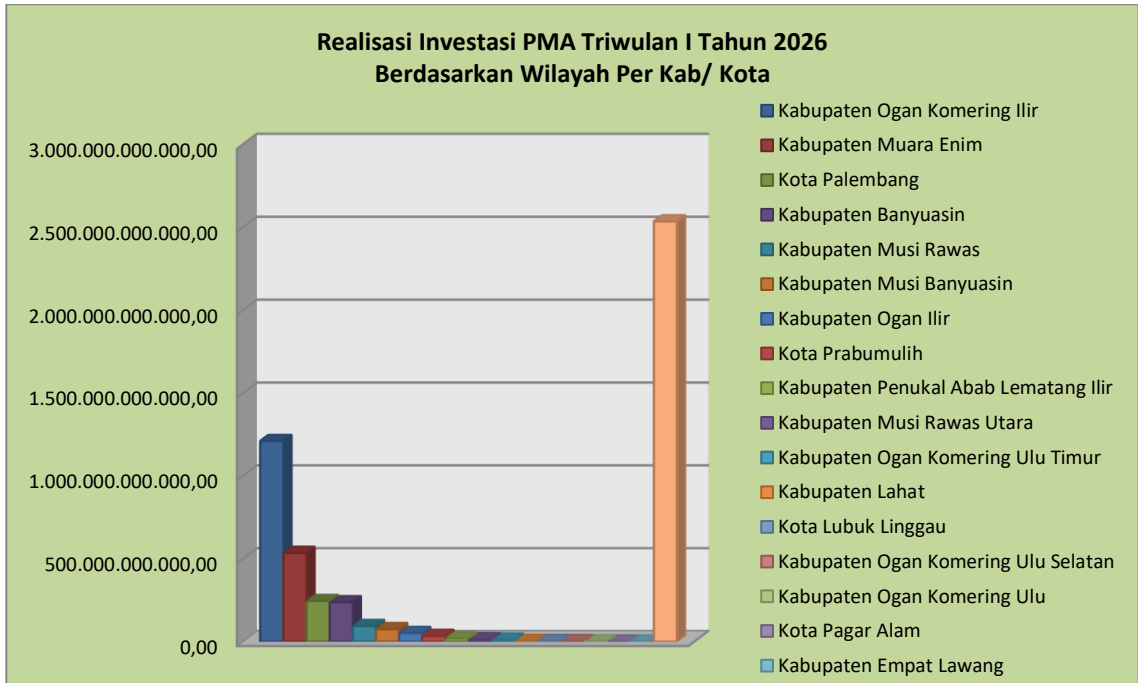
Total Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah perkab/kota pada Periode Triwulan I Tahun 2026 untuk Penanam Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 2.535.384.104.278,00 (Rp. 2,535 Trilyun) atau mengalami penurunan 34,62% bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.878.155.885.213,00 (Rp. 3,878 Trilyun) (Y/Y).

Nilai Realisasi Investasi PMA pada triwulan I Tahun 2026 tertinggi didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Realisasi Investasi sebesar Rp. 1.210.882.116.861,00 (Rp. 1,210 Trilyun), sedangkan Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam dengan Realisasi Investasi terkecil sebesar Rp. 0,00.

Untuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA pada triwulan I Tahun 2026 berjumlah 502 LKPM sedangkan penggunaan tenaga kerja PMA berjumlah 2.310 orang yang terdiri dari 2.291 orang TKI dan 19 orang TKA. Komposisi pencapaian realisasi investasi PMA

Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik Rincian Realisasi Investasi PMA Triwulan I Tahun 2026 se Sumatera Selatan berdasarkan wilayah di bawah ini :

Gambar. 1  
Grafik Realisasi Investasi PMA Triwulan I Tahun 2026  
berdasarkan wilayah perkab/ kota se Sumatera Selatan



Pada tabel. 13 menyajikan rincian realisasi investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan wilayah perkab/kota se-Sumatera Selatan.

Tabel. 13  
Rincian Realisasi Investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026  
se Sumatera Selatan berdasarkan wilayah

| No | Kabupaten / Kota | Realisasi Investasi (Rp) | Jumlah LKPM | Penggunaan Tenaga Kerja (Org) |     |       |
|----|------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|
|    |                  |                          |             | TKI                           | TKA | Total |
| 1  | Banyuasin        | 547.102.211.040,00       | 679         | 658                           | 0   | 658   |
| 2  | Empat Lawang     | 52.460.346.034,00        | 73          | 301                           | 0   | 301   |
| 3  | Lahat            | 558.034.577.508,00       | 259         | 918                           | 0   | 918   |
| 4  | Muara Enim       | 1.056.512.932.648,00     | 513         | 1.071                         | 0   | 1.071 |
| 5  | Musi Banyuasin   | 2.305.557.867.070,00     | 428         | 1.799                         | 1   | 1.799 |
| 6  | Musi Rawas       | 121.701.373.227,00       | 152         | 307                           | 0   | 307   |
| 7  | MURATARA         | 298.961.541.717,00       | 146         | 120                           | 0   | 120   |
| 8  | Ogan Ilir        | 187.067.868.588,00       | 189         | 249                           | 0   | 249   |
| 9  | OKI              | 2.078.529.162.964,00     | 321         | 852                           | 0   | 852   |
| 10 | OKU              | 148.731.204.341,00       | 206         | 128                           | 0   | 128   |
| 11 | OKUS             | 87.961.034.017,00        | 57          | 0                             | 0   | 0     |
| 12 | OKUT             | 29.865.259.401,00        | 172         | 60                            | 0   | 60    |
| 13 | PALI             | 832.070.881.379,00       | 159         | 89                            | 0   | 89    |
| 14 | Lubuk Linggau    | 68.745.428.794,00        | 290         | 311                           | 0   | 311   |

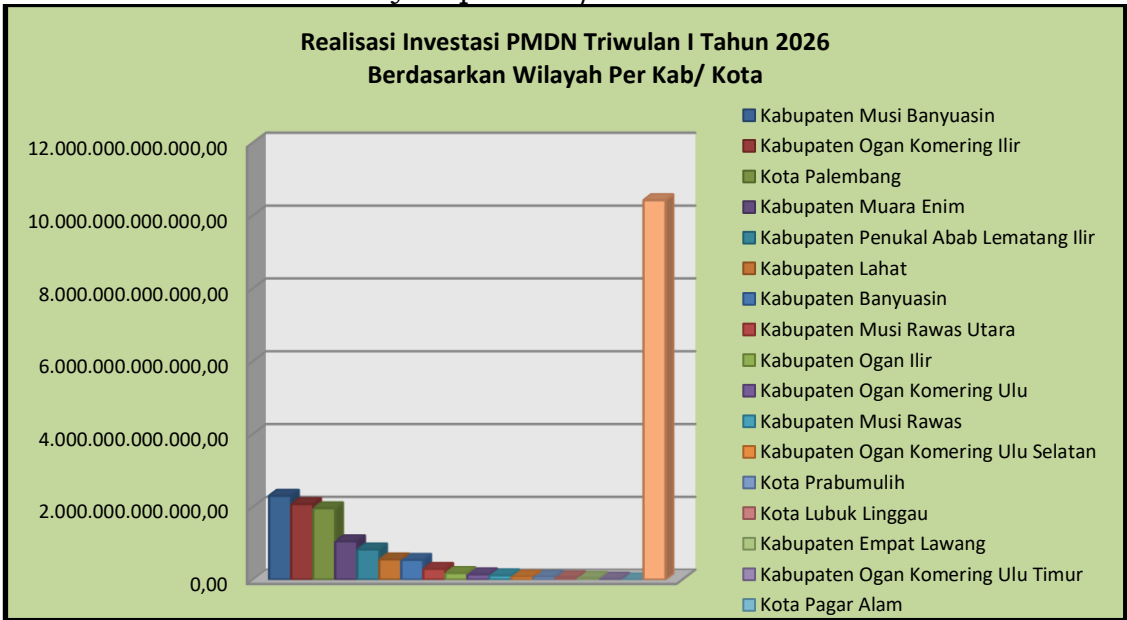
|    |            |                       |       |        |   |        |
|----|------------|-----------------------|-------|--------|---|--------|
| 15 | Pagar alam | 4.254.164.826,00      | 36    | 3      | 0 | 3      |
| 16 | Palembang  | 1.964.637.393.173,00  | 3.483 | 3.176  | 1 | 3.177  |
| 17 | Prabumulih | 83.829.849.877,00     | 410   | 248    | 0 | 248    |
|    | Jumlah     | 10.426.023.096.604,00 | 7.573 | 10.290 | 2 | 10.292 |

Total Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah perkab/kota pada Periode Triwulan I Tahun 2026 untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 10.426.023.096.604,00 (Rp. 10,426 Trilyun) atau mengalami peningkatan 5,98% bila dibandingkan capaian realisasi PMDN triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 9.837.701.815.365,00 (Rp. 9,837 Trilyun) (Y/Y).

Nilai Realisasi Investasi PMDN pada triwulan I Tahun 2026 tertinggi didominasi oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Realisasi Investasi sebesar Rp. 2.305.557.867.070,00 (Rp. 2,305 Trilyun), sedangkan Kota Pagar alam dengan Realisasi Investasi terkecil sebesar Rp. 4.254.164.826,00.

Untuk jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMA berjumlah 7.573 LKPM sedangkan penggunaan tenaga kerja investasi PMDN berjumlah 10.292 orang yang terdiri dari 10.290 orang TKI dan 2 orang TKA. Komposisi pencapaian realisasi investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik Rincian Realisasi Investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026 se Sumatera Selatan berdasarkan wilayah di bawah ini :

Gambar. 2  
Grafik Realisasi Investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan wilayah perkab / kota se Sumatera Selatan



II. REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN BERDASARKAN SUB SEKTOR

Pada tabel. 15 dibawah ini menyajikan total realisasi investasi PMA triwulan I tahun 2026 berdasarkan sub sektor.

Tabel. 15  
Rincian Realisasi Investasi PMA Triwulan I Tahun 2026  
Berdasarkan sub sektor

| No | Sektor                                                                                               | Triwulan 1       |                                   |                                       |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|
|    |                                                                                                      | Jumlah<br>Proyek | Nilai Investasi<br>(Dalam Rupiah) | Penggunaan<br>Tenaga Kerja<br>(Orang) |     |
|    |                                                                                                      |                  | Tambahan                          | TKI                                   | TKA |
|    | Primer                                                                                               |                  |                                   |                                       |     |
| 1  | Pertambangan                                                                                         | 17               | 65.856.880.456                    | 103                                   | 0   |
| 2  | Kehutanan                                                                                            | 9                | 181.505.613.742                   | 19                                    | 0   |
| 3  | Tanaman Pangan, Perkebunan<br>dan Perternakan                                                        | 66               | 122.029.946.836                   | 1.257                                 | 0   |
| 4  | Perikanan                                                                                            | 3                | 1.469.745.495                     | 0                                     | 0   |
|    | Jumlah                                                                                               | 95               | 370.862.186.529                   | 1.379                                 | 0   |
|    | Sekunder                                                                                             |                  |                                   |                                       |     |
| 1  | Industri karet dan plastik                                                                           | 17               | 45.553.681.607                    | 52                                    | 6   |
| 2  | Industri kayu                                                                                        | 15               | 64.936.447.938                    | 8                                     | 0   |
| 3  | Industri kertas dan percetakan                                                                       | 7                | 1.200.413.224.963                 | 2                                     | 0   |
| 4  | Industri Kimia dan Farmasi                                                                           | 10               | 30.923.472.279                    | 9                                     | 2   |
| 5  | Industri Makanan                                                                                     | 61               | 145.619.529.682                   | 191                                   | 0   |
| 6  | Industri Mesin, Elektronik,<br>Instrumen Kedokteran,<br>Peralatan Listrik, Presisi, Optik<br>dan Jam | 0                | 0                                 | 0                                     | 0   |
| 7  | Industri Mineral Non Logam                                                                           | 2                | 0                                 | 0                                     | 0   |
| 8  | Industri Logam Dasar, Barang<br>Logam, Bukan mesin &<br>Peralatannya                                 | 1                | 0                                 | 0                                     | 0   |
| 9  | Industri Kendaraan bermotor<br>dan Alat Transportasi lain                                            | 0                | 0                                 | 0                                     | 0   |
| 10 | Industri lainnya                                                                                     | 3                | 83.120.001                        | 0                                     | 0   |
| 11 | Industri Tekstil                                                                                     | 1                | 0                                 | 0                                     | 0   |
| 12 | Industri Barang dari Kulit dan<br>Alas Kaki                                                          | 0                | 0                                 | 0                                     | 0   |
|    | Jumlah                                                                                               | 117              | 1.487.529.476.470                 | 262                                   | 8   |
|    | Tersier                                                                                              |                  |                                   |                                       |     |
| 1  | Hotel dan Restoran                                                                                   | 47               | 3.921.338.841                     | 79                                    | 0   |
| 2  | Konstruksi                                                                                           | 6                | 22.764.165                        | 0                                     | 0   |
| 3  | Listrik, Gas dan Air                                                                                 | 13               | 407.269.069.008                   | 1                                     | 6   |
| 4  | Perdagangan dan Reparasi                                                                             | 101              | 112.067.366.291                   | 216                                   | 3   |
| 5  | Perumahan, Kawasan Industri<br>dan Perkantoran                                                       | 14               | 0                                 | 7                                     | 0   |
| 6  | Transportasi, Gudang dan<br>Telekomunikasi                                                           | 42               | 131.850.351.088                   | 1                                     | 0   |
| 7  | Jasa lainnya                                                                                         | 67               | 21.861.551.886                    | 346                                   | 2   |

|  |        |     |                   |       |    |
|--|--------|-----|-------------------|-------|----|
|  | Jumlah | 290 | 676.992.441.279   | 650   | 11 |
|  | TOTAL  | 502 | 2.535.384.104.278 | 2.291 | 19 |

Perkembangan realisasi investasi PMA berdasarkan sub sektor pada triwulan I tahun 2026 ini sangat baik sebesar Rp. 2.535.384.104.278,00 (Rp. 2,535 Trilyun) dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor sekunder sebesar Rp. 1.487.529.476.470,00 (Rp. 1,487 Trilyun) bila dibandingkan dengan dua sektor lainnya dengan sub bidang usaha Industri kertas dan percetakan yang mendominasi. Sedangkan sektor tersier sebesar Rp. 676.992.441.279,00 (Rp. 676 Milyar) dan sektor primer sebesar Rp. 370.862.186.529,00 (Rp. Rp. 370 Milyar). Bila dibandingkan dengan nilai capaian realisasi sub sektor PMA triwulan I tahun 2025 dengan realisasi terbesar pada sektor sekunder dengan nilai sebesar Rp. 1.983.634.933.029,00 (Rp. 1,983 Trilyun).

Pada tabel. 17 dibawah ini menyajikan total realisasi investasi PMDN triwulan I tahun 2026 berdasarkan sub sektor.

Tabel. 17  
Rincian Realisasi Investasi PMDN Triwulan I Tahun 2026  
Berdasarkan sub sektor

| No | Sektor                                                                                      | Triwulan 1    |                                |                                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|
|    |                                                                                             | Jumlah Proyek | Nilai Investasi (Dalam Rupiah) | Penggunaan Tenaga Kerja (Orang) |     |
|    |                                                                                             |               |                                | TKI                             | TKA |
|    | Primer                                                                                      |               |                                |                                 |     |
| 1  | Pertambangan                                                                                | 302           | 2.695.424.857.819              | 1.779                           | 0   |
| 2  | Kehutanan                                                                                   | 30            | 144.126.659.752                | 151                             | 0   |
| 3  | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Perternakan                                                  | 444           | 2.065.926.276.081              | 2.406                           | 0   |
| 4  | Perikanan                                                                                   | 7             | 650.000.000                    | 0                               | 0   |
|    | Jumlah                                                                                      | 783           | 4.906.127.793.652              | 4.336                           | 0   |
|    | Sekunder                                                                                    |               |                                |                                 |     |
| 1  | Industri karet dan plastik                                                                  | 24            | 30.372.877.221                 | 13                              | 0   |
| 2  | Industri kayu                                                                               | 43            | 111.071.293.658                | 16                              | 0   |
| 3  | Industri kertas dan percetakan                                                              | 17            | 9.129.478.506                  | 102                             | 0   |
| 4  | Industri Kimia dan Farmasi                                                                  | 51            | 1.468.315.407.855              | 110                             | 0   |
| 5  | Industri Makanan                                                                            | 173           | 1.623.667.900.502              | 241                             | 0   |
| 6  | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 24            | 2.012.510.000                  | 3                               | 0   |
| 7  | Industri Mineral Non Logam                                                                  | 37            | 10.602.393.219                 | 41                              | 0   |
| 8  | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan mesin & Peralatannya                              | 38            | 60.373.082.381                 | 11                              | 0   |

|    |                                                        |       |                    |        |   |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------|---|
| 9  | Industri Kendaraan bermotor dan Alat Transportasi lain | 8     | 276.400.000        | 0      | 0 |
| 10 | Industri lainnya                                       | 64    | 6.080.219.609      | 33     | 0 |
| 11 | Industri Tekstil                                       | 3     | 0                  | 0      | 0 |
| 12 | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki               | 0     | 0                  | 0      | 0 |
|    | Jumlah                                                 | 482   | 3.321.901.562.951  | 570    | 0 |
|    | Tersier                                                |       |                    |        |   |
| 1  | Hotel dan Restoran                                     | 311   | 101.769.699.941    | 400    | 0 |
| 2  | Konstruksi                                             | 1.518 | 894.198.796.006    | 237    | 0 |
| 3  | Listrik, Gas dan Air                                   | 110   | 131.510.149.619    | 101    | 1 |
| 4  | Perdagangan dan Reparasi                               | 2.890 | 255.925.538.544    | 2.477  | 0 |
| 5  | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran            | 262   | 76.969.565.108     | 86     | 0 |
| 6  | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi                | 460   | 396.963.512.260    | 359    | 0 |
| 7  | Jasa lainnya                                           | 757   | 340.656.478.523    | 1.724  | 1 |
|    | Jumlah                                                 | 6.308 | 2.197.993.740.001  | 5.384  | 2 |
|    | TOTAL                                                  | 7.573 | 10.426.023.096.604 | 10.290 | 2 |

Perkembangan realisasi investasi PMDN berdasarkan sub sektor pada triwulan I tahun 2026 ini sangat baik sebesar Rp10.426.023.096.604,00 (Rp. 10,426 Trilyun) dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Primer sebesar Rp. 4.906.127.793.652,00 (Rp. 4,906 Trilyun) bila dibandingkan dengan dua sektor lainnya dengan sub bidang usaha Pertambangan. Sedangkan sektor sekunder sebesar Rp. 3.321.901.562.951,00 (Rp. 3,321 Trilyun) dan sektor tersier sebesar Rp. 2.197.993.740.001,00 (Rp. 2,197 Trilyun). Bila dibandingkan dengan nilai capaian realisasi per sektor PMDN triwulan I tahun 2025 dengan realisasi terbesar pada sektor primer dengan nilai sebesar Rp. 4.665.480.414.460,00 (Rp. 4,665 Trilyun).

Rincian realisasi investasi PMDN dan PMA berdasarkan Sektor pada Triwulan I tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel. 19 dibawah ini:

Tabel. 19  
Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triwulan I Tahun 2026  
berdasarkan Sektor Utama

| Sektor | Primer      |                      | Sekunder    |                      | Tersier     |                      |
|--------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|        | Jumlah LKPM | Nilai Realisasi (Rp) | Jumlah LKPM | Nilai Realisasi (Rp) | Jumlah LKPM | Nilai Realisasi (Rp) |
| PMA    | 95          | 370.862.186.529      | 117         | 1.487.529.476.470    | 290         | 676.992.441.279      |
| PMDN   | 783         | 4.906.127.793.652    | 482         | 3.321.901.562.951    | 6.308       | 2.197.993.740.001    |
| TOTAL  | 878         | 5.276.989.980.181    | 599         | 4.809.431.039.421    | 6.598       | 2.874.986.181.280    |

Sedangkan total realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I tahun 2026 berdasarkan sektor utama ini didominasi oleh sektor primer sebesar Rp. 5.276.989.980.181,00 (Rp. 5,276 Trilyun). Sedangkan untuk sektor sekunder sebesar Rp. 4.809.431.039.421,00 (Rp. 4,809 trilyun) dan sektor Tersier sebesar Rp. 2.874.986.181.280,00 (Rp. 2,874 Trilyun).

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif adalah dengan mewujudkan Sasaran Strategis *Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal* dengan indikator *Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan Jumlah LKPM yang disampaikan Oleh Pelaku Usaha*. Pengukuran Persentase Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan merupakan jumlah realisasi permasalahan/ hambatan yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan/ hambatan yang dilaporkan dikalikan 100 persen.

Pengukuran Persentase Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan menggunakan rumus sebagai berikut :

% Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan = 
$$\frac{\sum \text{Realisasi permasalahan/ hambatan yang diselesaikan}}{\sum \text{Permasalahan/ hambatan yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Data :

- 1. Data Laporan permasalahan Pelaku Usaha Tahun 2026 = 2 Laporan
- 2. Data Realisasi permasalahan yang diselesaikan Triwulan I Tahun 2026 = 0 Realisasi

Dari rumus diatas Pengukuran Persentase Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan sebagai berikut :

% Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan = 
$$\frac{\sum \text{Realisasi permasalahan/ hambatan yang diselesaikan}}{\sum \text{Permasalahan/ hambatan yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{\% Permasalahan/ hambatan yang di} &= \frac{2}{0} \times 100 \% \\ \text{fasilitasi atau diselesaikan} &= 0 \% \end{aligned}$$

- Target Persentase Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan pada renstra Tahun 2026 = 0 %
- Realisasi Persentase Permasalahan/ hambatan yang di fasilitasi atau diselesaikan pada renstra Triwulan I Tahun 2026 = 0 %

$$\begin{aligned} \text{Kinerja Capaian \% Permasalahan terhadap target} &= \frac{0\%}{0\%} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja pada kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha periode Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif. Dari target yang ditetapkan sebesar 0%, realisasi yang dihasilkan mencapai 0% dengan persentase capaian sebesar 0%. Hal ini dikarenakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha belum dilaksanakan.

**III.2. Capaian Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Tahun 2026 dan Analisis Pencapaian**

Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi mempunyai 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha, dan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp. 533.241.248,- yang mana dalam pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 triwulan I terealisasi sebesar Rp. 0,-, dimana pagu anggaran Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-. Pagu anggaran Sub Kegiatan

Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-. Pagu anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebesar Rp. 463.241.248,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-.

Untuk rincian capaian realisasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada table 9 berikut :

Tabel.9  
Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2026  
Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Tahun 2026

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                              | Target Kinerja    | Realisasi Kinerja | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Fisik (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3                                                                              | 4                 |                   | 5             |                         | 6                   |
| I. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                   |                                                                                |                   |                   |               |                         |                     |
| 1. | Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                          |                                                                                |                   |                   |               |                         |                     |
| a. | Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha | Tercapainya rasio realisasi investasi terhadap rencana investasi (PMA-PMDN)    | 2 Kegiatan Usaha  | 0 Kegiatan Usaha  | 20.000.000    | 0                       |                     |
| b. | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha                                                                  | Jumlah Pelaku Usaha yang di bina tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal | 86 Pelaku Usaha   | 0 Pelaku Usaha    | 50.000.000    | 0                       |                     |
| c. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                    | Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme/pelaksanaan BAP                | 45 BAP Perusahaan | 3 BAP Perusahaan  | 463.241.248   | 0                       |                     |

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal” dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : *Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha*, maka ada empat upaya pencapaian sasaran yang dilakukan antara lain :

- a) Meningkatkan pemantauan, dan verifikasi data investasi dengan indikator Jumlah LKPM yang disampaikan perusahaan secara online dengan tepat waktu. Pencapaian Kinerja pada Triwulan I tahun 2026 ini sebesar 201,87% dengan jumlah LKPM adalah 8.075 LKPM yang terdiri dari 7.573 LKPM PMDN dan 502 LKPM PMA.
- b) Meningkatnya fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha (PMA/ PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah fasilitasi kendala pelaku usaha. Untuk realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2026 belum ada kegiatan usaha yang difasilitasi permasalahannya.
- c) Meningkatkan pembinaan perusahaan (PMA/ PMDN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah jumlah pelaku usaha yang dibina tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal. Untuk realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2025 belum ada bimbingan teknis kepada pelaku usaha.
- d) Peningkatan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Jumlah perusahaan yang diawasi dengan mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Untuk pencapaian triwulan I tahun 2026 tercapai 3 BAP atau telah dilaksanakan pengawasan sejumlah 3 perusahaan yang diawasi dengan alokasi Dana APBD TA-2026.

Adapun kegiatan pengawasan triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke CV. Indo Artha Persada Kota Lubuk Linggau



- Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT. Lautan Berlian Utama Motor Kab. OKU



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari laporan kinerja tim kerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal umumnya menyatakan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan tingkat realisasi fisik maupun anggaran yang optimal. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa kendala teknis dan administratif, seperti fluktuasi data di lapangan, keterbatasan sumber daya manusia, atau fluktuasi harga sarana.

Berikut beberapa ringkasan poin-poin kesimpulan antara lain:

- ✓ Nilai Realisasi Investasi triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 12.961.407.200.882,00 (Rp. 12,96 Trilyun) atau tercapai 70,32% dari target nasional Rp. 18,43 Trilyun, dan tercapai 116,13% dari target daerah Rp. 11,16 Trilyun bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi investasi triwulan I tahun 2025 lalu (Y/Y) sebesar Rp. 13.715.857.700.578,00 (Rp. 13,71 Trilyun) atau tercapai 69,56% dari target nasional Rp. 19,71 Trilyun, dan tercapai 128,97% dari target daerah Rp. 10,63 Trilyun.
- ✓ Total Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah perkab/kota pada Periode Triwulan I Tahun 2026 untuk Penanam Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 2.535.384.104.278,00 (Rp. 2,535 Trilyun) atau mengalami penurunan 34,62% bila dibandingkan capaian realisasi PMA triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 3.878.155.885.213,00 (Rp. 3,878 Trilyun) (Y/Y).
- ✓ Total Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan wilayah perkab/kota pada Periode Triwulan I Tahun 2026 untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 10.426.023.096.604,00 (Rp. 10,426 Trilyun) atau mengalami peningkatan 5,98% bila dibandingkan capaian realisasi PMDN triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 9.837.701.815.365,00 (Rp. 9,837 Trilyun) (Y/Y).
- ✓ Perkembangan realisasi investasi PMA berdasarkan sub sektor pada triwulan I tahun 2026 ini sangat baik sebesar Rp. 2.535.384.104.278,00 (Rp. 2,535 Trilyun) dengan pencapaian

pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor sekunder sebesar Rp. 1.487.529.476.470,00 (Rp. 1,487 Trilyun) bila dibandingkan dengan dua sektor lainnya dengan sub bidang usaha Industri kertas dan percetakan yang mendominasi. Sedangkan sektor tersier sebesar Rp. 676.992.441.279,00 (Rp. 676 Milyar) dan sektor primer sebesar Rp. 370.862.186.529,00 (Rp. Rp. 370 Milyar). Bila dibandingkan dengan nilai capaian realisasi sub sektor PMA triwulan I tahun 2025 dengan realisasi terbesar pada sektor sekunder dengan nilai sebesar Rp. 1.983.634.933.029,00 (Rp. 1,983 Trilyun).

- ✓ Perkembangan realisasi investasi PMDN berdasarkan sub sektor pada triwulan I tahun 2026 ini sangat baik sebesar Rp10.426.023.096.604,00 (Rp. 10,426 Trilyun) dengan pencapaian pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Primer sebesar Rp. 4.906.127.793.652,00 (Rp. 4,906 Trilyun) bila dibandingkan dengan dua sektor lainnya dengan sub bidang usaha Pertambangan. Sedangkan sektor sekunder sebesar Rp. 3.321.901.562.951,00 (Rp. 3,321 Trilyun) dan sektor tersier sebesar Rp. 2.197.993.740.001,00 (Rp. 2,197 Trilyun). Bila dibandingkan dengan nilai capaian realisasi per sektor PMDN triwulan I tahun 2025 dengan realisasi terbesar pada sektor primer dengan nilai sebesar Rp. 4.665.480.414.460,00 (Rp. 4,665 Trilyun).
- ✓ Total realisasi investasi PMA dan PMDN triwulan I tahun 2026 berdasarkan sektor utama ini didominasi oleh sektor primer sebesar Rp. 5.276.989.980.181,00 (Rp. 5,276 Trilyun). Sedangkan untuk sektor sekunder sebesar Rp. 4.809.431.039.421,00 (Rp. 4,809 trilyun) dan sektor Tersier sebesar Rp. 2.874.986.181.280,00 (Rp. 2,874 Trilyun).
- ✓ Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi mempunyai 3 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usaha, Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha, dan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp. 533.241.248,- yang mana dalam pembiayaannya menggunakan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 triwulan I terealisasi sebesar Rp. 0,-, dimana pagu anggaran Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-. Pagu anggaran Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-. Pagu anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sebesar Rp. 463.241.248,- dengan realisasi APBD triwulan I sebesar Rp. 0,-.

- ✓ Secara keseluruhan, Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam periode pelaporan. Kinerja ditunjukkan melalui tercapainya target kegiatan utama, seperti pemantauan dan evaluasi realisasi investasi, peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM, bimbingan teknis kepada pelaku usaha serta fasilitasi penyelesaian kendala yang dihadapi investor.
- ✓ Koordinasi dengan instansi terkait juga berjalan efektif, yang berdampak positif terhadap kelancaran pelaksanaan penanaman modal. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan teknis dalam pelaporan, upaya perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan sistem digital.
- ✓ Dengan capaian ini, tim kerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal berperan penting dalam mendukung iklim investasi yang kondusif dan transparan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan realisasi penanaman modal. Diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek regulasi, koordinasi lintas sektor, dan digitalisasi pengawasan agar kinerja ke depan semakin efektif dan berdampak nyata.

#### IV.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut (RTL) laporan kinerja Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berfokus pada **optimalisasi pengawasan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan**

**penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**, dan **pembinaan langsung (fasilitasi/pendampingan)** agar realisasi investasi di daerah mencapai target yang ditetapkan.

Secara rinci, rencana tindak lanjut tersebut mencakup beberapa langkah strategis sebagai berikut:

- **Peningkatan Kepatuhan LKPM:** Mengintensifkan pengawasan kepatuhan pelaporan dengan memberikan sanksi administratif dan *bimbingan teknis* bagi pelaku usaha yang belum taat melaporkan realisasi investasinya melalui sistem OSS.
- **Optimalisasi Pendampingan:** Memperkuat layanan asistensi (*helpdesk*) dan forum konsultasi penyelesaian hambatan penanaman modal baik untuk usaha skala kecil maupun besar.
- **Sinergi Pusat dan Daerah:** Memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP di berbagai daerah, termasuk wilayah seperti Palembang, untuk menyinkronkan data potensi dan permasalahan investasi.

Dengan tindak lanjut tersebut, Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diharapkan mampu mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan peran strategisnya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.